

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DI KABUPATEN GORONTALO

Nur Istyan Harun¹, Suaib Napir², Muten Nuna³, Robby Hunawa⁴,
Nirmala A. Sahi⁵

¹Universitas Gorontalo ; isty.harunc@gmail.com

²Universitas Gorontalo; suaibnapir9@gmail.com

³Universitas Gorontalo; mutensnuna@gmail.com

⁴Universitas Gorontalo ; robyhunawa86@gmail.com

⁵Universitas Gorontalo; dewi.walahe31@gmail.com

Dikirimkan: 15 Juni 2023

Direvisi: 22 Juni 2023

Diterbitkan: 31 Agustus 2023

Keywords :

Communications,
Strategy, Politics

Abstract

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) in the 2019 Election in Gorontalo Regency showed extraordinary achievements, where PPP's vote acquisition increased by 250% from PPP's vote acquisition in the 2014 election. With this increase in votes, PPP's vote acquisition in the Gorontalo Regency DPRD experienced a significant increase from 4 the seats in the 2014 election results became 7 seats in the 2019 election results, which led PPP to become the chairman of the Gorontalo Regency DPRD Chairperson. Of course, this achievement is the success of the PPP strategy, both in beating its legislative candidates and in the communication that is built in the midst of society. This qualitative descriptive research by prioritizing primary data and secondary data focuses on seeing how PPP's political communication strategy won in Gorontalo District. The results of the study show that the United Development Party's winning strategy for Gorontalo Regency in the 2019 legislative election uses a winning strategy that utilizes marketing politics for campaign strategies both to gain political support in general elections and to maintain an image during the election break. The obstacles faced by PPP candidates in the implementation of the 2019 legislative elections in Gorontalo Regency include money politics, black campaigns, political apathy, and overlapping claims between fellow candidates on the same choice basis.

PENDAHULUAN

Partai politik adalah salah satu dari instrumen demokrasi, dimana sebuah partai politik dapat meningkatkan kualitas dari demokrasi melalui Pemilihan Umum dengan

keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan aspirasinya yang dapat disalurkan melalui partai politik (Abdillah, 2015; Juniar, 2021). Sejarah partai politik di Indonesia juga merupakan bukti dari aktualisasi masyarakat yang dilembagakan, yaitu banyak entitas dalam masyarakat yang menyatukan diri dengan membentuk partai politik. Partisipasi politik, maupun perwujudan kedaulatan penduduk, merupakan hal yang fundamental dalam demokrasi (Kuswandi dkk., 2023; Pasaribu, 2017). Partisipasi masyarakat yang tinggi menandai cara yang tegas untuk kemajuan politik yang lebih baik dan demokrasi di Indonesia, (Aneta dkk., 2021). Prinsip demokrasi mengandung arti dijunjung tingginya hak setiap orang untuk berpendapat, untuk memiliki ideologi tertentu dan memiliki identitas tertentu serta menghargai setiap pendapat yang keluar dari pikiran setiap orang (Permana & Adi, 2015; Zuhro, 2018). Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Prinsip semacam *trias politica* ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (Nuna & Moonti, 2019).

Kabupaten Gorontalo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo yang memiliki potensi politik yang signifikan. Sebagai wilayah dengan potensi pertumbuhan ekonomi dan sosial yang tinggi, partai politik termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), harus memiliki strategi komunikasi yang efektif untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam pemilihan umum maupun dalam mengadvokasi kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan wilayah. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Gorontalo dipimpin oleh Syam pada Musyawarah Cabang periode 2017–2022. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo menunjukkan prestasi yang luar biasa, dimana perolehan suara PPP meningkat sebanyak 250% dari perolehan suara PPP pada pemilu tahun 2014. Dengan peningkatan suara tersebut membuat perolehan kursi PPP di DPRD Kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan yang signifikan dari 4 kursi hasil pemilu 2014 menjadi 7 kursi hasil pemilu 2019. Keberhasilan PPP meningkatkan jumlah kursi diluar dugaan dan membuat kaget partai-partai besar lainnya di Kabupaten Gorontalo, perolehan 7 kursi tersebut mengantarkan PPP menjadi pimpinan Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo (KPU Kabupaten Gorontalo, 2020). Perolehan tersebut merupakan keberhasilan strategi PPP dalam perekrutan calon legislatif, terlebih pengaruh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Provinsi Gorontalo menjabat sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo sehingga banyak masyarakat berlomba-lomba untuk mendaftarkan diri sebagai badan calon legislatif di sekretariat dewan pimpinan cabang PPP Kabupaten Gorontalo dimana setiap daerah pilihan sudah terpenuhi batas pendaftarannya. Hal ini menjadi masalah terhadap dewan pimpinan cabang PPP Kabupaten Gorontalo, karena butuh ketelitian untuk memutuskan calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo. Salah satunya dengan menggunakan mekanisme partai sesuai juru teknis dewan pimpinan PPP untuk

menjaring calon anggota DPRD dimana setiap daerah pilihan akan dipilih sepuluh orang terbaik dari sekian pendaftar untuk mengikuti tahapan berikutnya yakni menyediakan dukungan berupa foto copy KTP minimal 1000 (seribu) apabila pendaftar tidak memenuhi persyaratan dimaksud akan gugur sendirinya untuk menjadi bakal calon anggota DPRD. Setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh dewan pimpinan cabang PPP Kabupaten Gorontalo akhirnya terpilih nama-nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang diputuskan pada rapat pleno PPP dengan memperhatikan perwakilan jumlah pendaftar perempuan sebanyak 30% sebagaimana syarat komisi pemilihan umum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis strategi komunikasi yang digunakan oleh PPP dalam Pemilu tahun 2019 dalam memilih calon legislative serta menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh calon legislative PPP pada pelaksanaan pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Gorontalo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam strategi komunikasi politik yang digunakan oleh PPP di Kabupaten Gorontalo. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang strategi ini, partai politik lainnya, masyarakat, dan peneliti lain dapat mengambil pelajaran yang bermanfaat dalam merancang dan melaksanakan strategi komunikasi politik yang efektif.

TINJAUAN TEORI

Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Hermawan, 2020; Imansyah, 2012; Putra dkk., 2020). Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang setiap anggotanya mempunyai tujuan dari nilai-nilai yang sama. Tujuan yang terpenting dalam partai politik adalah memperoleh kekuasaan seluas-luasnya dengan menduduki kader-kader ke dalam lembaga pemerintahan (O. S. L. W. Aji, 2016; Santoso, 2011). Partai politik merupakan pilar dari kehidupan politik yang demokratis. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya partai politik menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip dasar kehidupan yang demokratis (Komarudin, 2011). Sedangkan dalam ilmu politik dimana partai politik merupakan sekelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang disatukan dan didorong oleh suatu ideologi tertentu, yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan lewat pemilihan umum guna melaksanakan kebijaksanaan umum dan sarana pengintegrasian masyarakat, serta saluran partisipasi masyarakat dalam proses politik (Suhaimi, 2021)

Neumann dalam Riyadh U.B. & Sukmana, (2015) mengemukakan definisi partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda, salah satu fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik yaitu untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*) (Febrian, 2016; Giawa & Rini, 2017). Partai politik sangat berbeda dengan organisasi lainnya, secara umum perhatian utama partai politik adalah pemilu dengan sepenuh waktu berkomitmen pada aktivitas politik, memobilisasi masa dalam jumlah yang sangat besar, memiliki waktu yang sangat lama serta mereka menyediakan diri sebagai simbol politik. Sedangkan organisasi merupakan entitas yang bekerjanya didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu seperti adanya kepemimpinan dan keanggotaan, devisionalisasi dan spesifikasi, melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol serta adanya aturan main yang mengatur perilaku anggota dan organisasi (Pamungkas, 2011).

Berdasarkan pendapat tersebut, menjadi jelaslah bahwa partai politik hendaklah melakukan fungsinya dengan baik, jika dikaitkan dengan penelitian ini, bagaimana partai politik khususnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Gorontalo dapat mengambil suatu langkah dalam membangun suatu rangkaian dimasyarakat guna merebut kursi legislatif dimana fungsinya adalah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah memilihnya di Kabupaten Gorontalo.

Rekrutmen Politik

Dalam situasi keadaan partai politik juga menghadapi maraknya fenomena “naturalisasi” kader partai politik dari satu partai ke partai lain sebagai akibat lemahnya sistem rekrutmen dan pola kaderisasi tersebut yang memprihatinkan. Lemahnya rekrutmen politik oleh partai politik menyangkut juga masalah fundraising (pengumpulan dana) (M. P. Aji & Indrawan, 2020; O. S. L. W. Aji, 2016; Suhaimi, 2018). Ketika sebuah partai menghadapi krisis dalam hal pendanaan maka kemungkinan segala macam cara akan dilakukan termasuk dengan menggadaikan ideologi partai, hal ini dikarenakan biaya Pemilu yang mahal, maka jalan satu-satunya partai politik memanfaatkan kadernya yang memiliki posisi strategis dalam jabatan politik untuk mengumpulkan dana secara illegal dan berusaha untuk menjadikannya seolah-olah legal. Tidak heran jika ada institusi atau badan usaha Negara yang disebut sebagai ‘sapi perah’. Realitas tersebut tentunya sangat mengancam keuangan negara dan menjelekan citra partai politik yang bersangkutan (Suhaimi, 2021). Salah satu fungsi partai politik dalam sistem politik demokrasi adalah fungsi rekrutmen politik. fungsi ini merupakan fungsi khas partai politik. Bagi partai politik, calon yang dinominasikan memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik partai politik yang bersangkutan di depan publik bahwa rekrutmen politik menunjukkan tipologi partai. Jadi, apakah sebagai partai massa, kader, *catch-all*, kartel atau *business-firm* dapat dilihat dari bagaimana rekrutmen politik dilakukan (Fitriyah, 2020).

Adapun yang dimaksud dengan rekrutmen politik adalah proses oleh partai politik dalam mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik tidak sebatas hanya untuk mencari anggota baru, tetapi juga merekrut dan mencalonkan anggota partai untuk posisi jabatan publik. Rekrutmen politik juga dimaknai luas, sebagai cara pemilihan, seleksi, dan pengangkatan para warga negara guna untuk diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya (UB & Sukmana, 2015; Zaetun & Mar'iyah, 2020). Menurut Anggoro dkk., (2020) terdapat tiga dimensi (variabel utama) rekrutmen, yaitu: motivasi, sumber daya, dan kesempatan. Dampak mereka adalah kumulatif dan mereka tidak dapat dioperasionalkan secara sendiri-sendiri satu sama lain. Kandidat yang potensial perlu dimotivasi untuk mencari jabatan, tapi berbagai motivasi dapat mengarah pada suatu pencalonan, sumber dayanya dapat terdiri dari aset-aset tersebut seperti fleksibilitas pekerjaan dan kemampuan untuk membuat pengorbanan finansial yang diperlukan. Dengan demikian, kesempatan membandingkan kompatibilitas dengan kriteria pemilihan dari perwakilan perekrutan dan tingkat ketidakpastian mengenai hasil dari pemilihan.

Strategi Komunikasi Politik

Strategi politik dengan melakukan pendekatan dan komunikasi politik perlu dilakukan oleh para kontestan untuk dapat memenangkan pemilu. Para kontestan perlu melakukan kajian untuk mengidentifikasi besaran (*size*) pendukungnya, massa mengambang dan pendukung kontestan lainnya. Identifikasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh pada saat pencoblosan, juga untuk mengidentifikasi strategi pendekatan yang diperlukan terhadap masing-masing kelompok pemilih. Strategi ini perlu dipikirkan oleh setiap kontestan karena pesaing juga secara intens melakukan upaya-upaya untuk memenangkan persaingan politik (Ahyani & Nurhasanah, 2020; Sukri, 2020). Disamping itu, partai politik juga perlu melakukan strategi pemetaan karakteristik pemilih, karena di masyarakat terdapat kelompok masyarakat yang lebih menggunakan logika dan rasionalitas dalam menentukan pilihan terhadap kontestan. Kemampuan partai politik dalam memecahkan persoalan masyarakat menjadi titik perhatian kelompok masyarakat ini (Tinov & Handoko, 2016). Namun banyak juga kelompok masyarakat yang memilih karena memiliki kedekatan ideologis. Mereka memperdulikan program apa yang ditawarkan oleh partai politik. Asalkan ideologi partai sama dengan ideologi pemilih maka cukup alasan untuk mencoblosnya (Firmanzah, 2011). Partai politik dalam melakukan komunikasi politik dengan konstituen dan warga masyarakat juga menggunakan strategi kampanye yang biasa disebut dengan *direct selling* atau kampanye *door to door*. *Direct selling* merupakan teknik jitu pendekatan interpersonal agar orang lain mendukung partai dan calon presiden pilihan dalam pemilu (Searcy & Elkhawas, 2012).

Dalam sebuah strategi tersimpan tujuan khusus, salah satunya adalah "kemenangan". Sehingga untuk mencapai kemenangan tersebut dibutuhkan suatu

metode perencanaan strategi. Peter Schroder (2009) berpendapat bahwa terdapat empat perencanaan strategi, yaitu, i) pendekatan metodologis: kemiliteran, berorientasi pasar, politis, ii) model kemiliteran, iii) model perencanaan korporasi, dan iv) model perencanaan korporatis (Fatimah, 2018).

1. Pendekatan Metodologis: Kemiliteran, Berorientasi Pasar, Politis.

Dalam pendekatan ini terdapat gambaran yang memiliki makna masing-masing ada perbedaan dan persamaan. Pendekatan tersebut saling berpotongan tidak hanya karena dalam persamaan metodologinya, tetapi juga karena beberapa menjadi bagian dari strategi lainnya. Dengan demikian strategi militer dapat selalu menjadi bagian dari strategi politis, dan sebuah strategi politis juga selalu merupakan strategi pasar, atau setidaknya menunjukkan adanya orientasi pasar, yang perlu kita lihat pada saat kampanye pemilu.

2. Model Kemiliteran

Untuk lebih menghargai penerapan strategi militer atas strategi lainnya, seseorang perlu memiliki beberapa pengetahuan dasar mengenai konsep dan prinsip perang. Menurut Wylie, tujuan awal seorang perencana strategi dalam perang adalah memiliki kontrol atas musuhnya. Kontrol ini terjadi melalui suatu pola perang yang dimanipulasi dengan cara agar titik berat perang tersebut bergerak ke arah yang menguntungkan si perencana strategi dan merugikan musuh. Titik berat perang menentukan hasil perang tersebut. Oleh karena itu, tujuan utama strategi adalah memindahkan titik berat perang bagi keuntungan pihak sendiri. Hal ini tergantung pada beberapa faktor: hakekat perang, tempat dan waktu perang, serta bobot titik berat

3. Model Perencanaan Korporasi

Perencanaan korporasi merupakan analisa sistematis dan perumusan tujuan yang mengarah ke depan, yang mencakup cara dan pilihan-pilihan bersikap, pilihan optimal yang dimiliki dan penetapan instruksi-instruksi untuk merealisasikannya secara rasional.

4. Model Perencanaan Politis

Dalam proses perencanaan politis terdapat pola yang diutamakan yaitu: Perencanaan strategi melakukan upaya untuk memposisikan organisasi berdasarkan realita lingkungan operasionalnya. Ada dua jenis lingkungan: i) lingkungan eksternal yang merupakan wilayah dimana kekuatan atau faktor lain mempengaruhi atau dipengaruhi oleh organisasi tersebut. ii) lingkungan internal, yang terdiri atas sumberdaya-sumberdaya, kekuatan, peluang, serta tuntutan dari dalam organisasi itu sendiri. Perencanaan strategi harus mampu mengenali dan menilai peluang dan ancaman yang terjadi di lingkungan eksternal yang berhubungan dengan visi, serta tujuan akhir organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analitis untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang kompleks dan konteks-spesifik dari strategi

komunikasi politik. (Hasanah, 2017; Sugiyono, 2018). Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi terlibat pada acara-acara politik PPP seperti rapat partai, kampanye, dan pertemuan dengan masyarakat. Observasi ini akan memberikan pemahaman langsung tentang bagaimana strategi komunikasi diterapkan dalam situasi nyata, wawancara langsung dilapangan terhadap anggota PPP, termasuk tokoh-tokoh senior, kader, dan pengurus partai di Kabupaten Gorontalo. Wawancara ini akan menggali pandangan mereka tentang strategi komunikasi yang telah dan sedang dilaksanakan dan analisis dokumen resmi partai, pernyataan publik, materi kampanye, dan tulisan media terkait PPP di Kabupaten Gorontalo. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan tematis. Peneliti akan mengidentifikasi pola-pola dalam strategi komunikasi politik PPP, tujuan-tujuan yang ingin dicapai, target audiens, pesan-pesan yang diusung, dan dampak yang diharapkan. Data-data ini akan dikategorikan dan dikaitkan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang strategi komunikasi politik PPP di Kabupaten Gorontalo. Teknik analisis penelitian melalui 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan (interaktif), yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Ahmad Tanzeh dan Suyitno, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Kemenangan PPP Kabupaten Gorontalo pada Pemilu Legislatif 2019

Strategi pemenangan dalam menghadapi pemilu legislatif oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Gorontalo dilakukan dengan menggunakan perencanaan yang cermat dalam proses pemenangan pada pemilu legislative tahun 2019. Strategi pemenangan tersebut disusun dan dilaksanakan oleh tim sukses yang memiliki tujuan mencapai kemenangan atas sasaran yang ditentukan. Dimana dalam pemilu legislatif yang menjadi kunci dalam proses pemenangan adalah strategi komunikasi. Selain tujuan, juga terdapat sasaran yang menjadi target dukungan pemilihan yang diwujudkan dalam pemberian suara kepada partai politik tersebut dalam memenangkan dalam proses pemilihan legislative.

Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh PPP Kabupaten Gorontalo bertujuan untuk mempertahankan konstituen lama dan mendapatkan konstituen baru. Dalam hal ini PPP Kabupaten Gorontalo melakukan strategi komunikasi politik menurut segmentasi pemilih. Dimana pemilih yang menjadi target PPP dilakukan berdasarkan pemilih lama dan pemilih baru. Segmentasi pemilih ini menurut (Smiht dan Hirst, 2001) dilakukan untuk :

1. Membantu identifikasi kepentingan dan tujuan politik masing-masing masyarakat.
2. Membantu partai politik untuk lebih meningkatkan ketetapan program kerja dan isu politik di setiap kelompok masyarakat.

3. Membantu organisasi politik dalam mengembangkan program komunikasi politik. Mengingat masing-masing kelompok masyarakat memiliki cara berpikir yang berbeda.
4. Membantu dalam analisis atas persaingan politik, melihat jumlah yang ada di setiap segmen akan membantu organisasi politik bersangkutan dalam menghitung probabilitas untuk menang atau kalah.
5. Membantu organisasi politik untuk mengembangkan program marketing politik yang lebih tepat sasaran dan komprehensif

Dalam hal ini PPP Kabupaten Gorontalo menggunakan metode segmentasi pemilih demografi yakni, konsumen politik yang dapat dibedakan berdasarkan umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan dan kelas sosial. Namun dilihat dari segi prakteknya PPP Kabupaten Gorontalo hanya membedakan pemilih berdasarkan usia dalam menjalankan strategi komunikasi politiknya, berikut adalah langkah-langkah strategi komunikasi politik yang digunakan oleh PPP Kabupaten Gorontalo dalam menarik simpati pemilih dari kalangan pemuda dan orang tua. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua DPC PPP Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa perolehan pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 Partai Persatuan Pembangunan hanya dapat memperoleh 4 kursi dari total 35 kursi yang ada di DPRD Kabupaten Gorontalo, 1 kursi dapil Telaga Cs atas nama Ir. Hendra R. Abdul, dapil Limboto Cs atas nama Jayusdi Rivai, dapil Batudaa Cs atas nama Syam dapil Pulubala Cs atas nama Rusli M. Panigoro dan dapil Tibawa Cs tidak mendapatkan kursi (Ketua DPC PPP Kabupaten Gorontalo, komunikasi pribadi, 2019). Pemilihan umum legislatif tahun 2019 berbeda perhitungan pada pemilu 2014 yang menggunakan metode kuota hare dimana penentuan jumlah suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu kursi DPRD, caranya membagi total suara sah dengan alokasi kursi yang tersedia atau nilainya disebut dengan bilangan pembagi pemilih (BPP), sedangkan pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 perhitungan suara tidak lagi memakai Kuota Hare, melainkan menggunakan metode *Sainte Lague* murni dimana perhitungan tidak menetapkan harga suara yang dibutuhkan untuk memperoleh satu kursi. Pemenang akan ditentukan menggunakan bilangan pembagi ganjil, atau total suara sah partai politik akan dibagi dengan bilangan pembagi ganjil.

Berkaca pada pengalaman pemilihan umum kemarin DPC PPP Kabupaten Gorontalo pada Pemilu 2019 merubah pola kampanye yang biasanya lebih banyak model kampanye dialogis pada saat ini lebih banyak model blusukan atau turun langsung ke pemukiman masyarakat dan pasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa strategi yang diperankan oleh calon legislaif yang diusung oleh PPP merupakan kandidat yang mempunyai kemampuan strategi dalam memenangkan pertarungan pada pemilihan legislatif tahun 2019. Dimana PPP sebagai partai yang tergolong tua usianya memiliki basis yang cukup kuat pada masyarakat pemilih di Kabupaten Gorontalo. selain itu, kekuatan yang dimiliki oleh PPP di Kabupaten Gorontalo karena kedudukan kekuasaan sebagai kepala daerah juga merupakan kader dari PPP tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jayusdi Rivai 2019 calon legislative yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Gorontalo menyatakan bahwa pada proses pemilihan legislatif tahun 2019 telah dilakukan strategi oleh PPP terhadap berbagai kelompok pemilih (Jayusdi Rivai, komunikasi pribadi, 2019). Dimana strategi komunikasi sudah dilakukan dengan baik, baik komunikasi dengan kelompok pemilih pemuda maupun komunikasi dengan kelompok pemilih tua. Strategi PPP yang dimainkan sangatlah jelas dapat mendorong dan menambah kekuatan sangat signifikan. Dimana terbukti pada pemilu legislatif pada tahun 2014 hanya mampu meloloskan 4 kursi, sementara pada pemilihan legislatif tahun 2019 telah mampu meloloskan kader PPP sebanyak 7 kursi. Kemampuan dalam meraih kursi dengan suara terbanyak menunjukkan bahwa PPP memiliki strategi yang sangat jitu dalam menguasai suara pemilih pada pemilihan legislatif pemilu 2019.

Model strategi komunikasi PPP Kabupaten Gorontalo pada Pemilu Legislatif 2019

Adapun Strategi Komunikasi Untuk Kalangan Pemilih Pemula DPC PPP Kabupaten Gorontalo telah memerintahkan kepada Calon Anggota Legislatif untuk membuat program kegiatan masing-masing yang menurut mereka dapat mendulang suara pemilih pemula. Dimana pemilih dengan kelompok kalangan pemuda merupakan salah satu pemilih yang masuk dalam kategori potensial karena merupakan bagian pemilih yang memiliki pengaruh yang besar. Berbagai cara dilakukan dalam menguasai strategi komunikasi politik PPP kabupaten Gorontalo terhadap kelompok pemilih pemuda dengan cara cara yang sesuai dengan keadaan atau kondisi pemuda. Berbagai kegiatan dilakukan oleh para kandidat anggota legislative pada tahun 2019 untuk dapat memiliki pengaruh terhadap kelompok pemilih pemuda atau pemilih pemula dengan cara yang sesuai dengan kondisi atau keadaan yang merupakan ruang lingkup anak muda. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus PPP Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa kelompok pemilih pemuda atau pemilih pemula merupakan suatu kelompok pemilih yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Dimana berbagai kegiatan sudah dilakukan untuk lebih menguatkan dan merupakan bagian dari strategi yang sudah dilakukan. Adapun kegiatan kegiatan yang dilakukan para calon anggota legislative, diantaranya membentuk posko posko pemenangan di desa-desa sesuai daerah pemilihan, dimana posko tersebut jadi tempat berkumpulnya anak muda dengan disediakan fasilitas free wi-fi dan makan minum seadanya. Selain itu, juga dilakukan dalam rangka membantu kegiatan kegiatan kepemudaan seperti tournament sepak bola. PPP juga merekrut relawan muda sebagai ujung tombak yang bertugas menyebarkan bahan kampanye seperti stiker dan alat peraga kampanye lainnya yang memuat visi dan misi caleg.

Berbagai strategi dilakukan oleh partai persatuan pembangunan Kabupaten Gorontalo terhadap kalangan muda atau kelompok muda dalam meraih suara terbanyak di DPRD Kabupaten Gorontalo. geliat pembentukan posko dan tim anak muda diprogramkan oleh para calon anggota legislative PPP Kabupaten Gorontalo pada daerah wilayah pemilihan masing-masing sebagai bagian dari bangunan

komunikasi yang dilakukan kepada kelompok pemilih pemuda. PPP menggunakan strategi dengan menggunakan program yang sesuai dengan kebutuhan anak muda. Para calon anggota legislative turun langsung berkomunikasi dengan anak muda dan mengadakan kegiatan yang merupakan kegiatan anak muda. Ada kegiatan olah raga seperti pertandingan sepak bola dilakukan karena hal itu dinilai sebagai program yang bisa memberikan keuntungan pada sisi popularitas bagi pemilih, mengingat minat anak muda cukup tinggi dalam olah raga tersebut.

Adapun Strategi Komunikasi Untuk Kalangan Pemilih Orang Tua, Selain komunikasi PPP kabupaten Gorontalo dengan kelompok anak muda, juga dibangun komunikasi dengan kelompok pemilih orang tua. Untuk menggaet dukungan dari pemilih kalangan orang tua PPP Kabupaten Gorontalo melakukan strategi komunikasi politik dengan membangun komunikasi dan silaturahmi dengan tokoh masyarakat, dan ulama. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Syam (2019) selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa komunikasi partai persatuan pembangun dilakukan dengan berbagai elemen masyarakat (Syam, komunikasi pribadi, 2019). Kalangan masyarakat yang menjadi target komunikasi adalah kyai, tokoh masyarakat, ulama, dan para pimpinan pesantren. Dimana kelompok orang tua yang dimasuki adalah para tokoh yang memiliki basis yang cukup besar. Selain itu juga dibentuk kelompok majelis ta'lim dan semua ketua majelisnya menjadi kelompok sasaran untuk target pemilih partai persatuan pembangunan tersebut. Strategi tersebut dalam menguasai kelompok atau basis kelompok tersebut terbukti PPP Kabupaten Gorontalo dapat meraih suara terbanyak yang tadinya 4 Kursi menjadi 7 kursi pada pemilihan legislative pada tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo. Strategi yang dilakukan dalam memasuki pimpinan pesantren dan juga kelompok majelis ta'lim dilakukan dengan adanya kegiatan pengajian dan pemberian bantuan Alquran. Kegiatan ini rutin dilakukan sehingga kedekatan antara partai persatuan pembangunan dengan kelompok pemilih strategis dapat dibangun dengan baik. PPP mampu menguasai basis tersebut dengan pola komunikasi yang lebih mengedepankan pada program yang bersifat keagamaan. Apalagi masyarakat kabupaten gorontalo ini memiliki kedekatan secara historis dengan PPP. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu caleg PPP Kabupaten Gorontalo yang lolos di DPRD menunjukkan bahwa PPP Kabupaten Gorontalo melakukan komunikasi dengan kelompok strategis untuk memperoleh basis suara secara riil. Cara ini dinilai berpengaruh karena perolehan kursi PPP di Kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan secara signifikan. Selain itu untuk mendapat dukungan dari kalangan orang tua beberapa calon anggota legislative menyediakan peminjaman tenda, kursi dan sound system gratis, dalam artian untuk alatnya gratis yang dibayar hanya jasa pekerja. Cara itu dilakukan sebagai bentuk strategi yang diyakini dapat membantu caleg dalam meningkat pada calon anggota legislative PPP.

Dalam proses legislative terdapat suatu tahapan kampanye Calon Anggota DPRD sesuai jadwal KPU dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019. Strategi yang dilakukan partai persatuan pembangunan di Kabupaten

Gorontalo menurut Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu Alex Maga melalui wawancara menunjukkan bahwa pola atau strategi caleg PPP adalah menggunakan metode tatap muka langsung atau caleg turun langsung ke masyarakat. Dimana metode ini dianggap sederhana dan lebih mudah difahami berbagai program yang akan diperjuangkan oleh partai politik ketika wakilnya terpilih dan duduk di DPRD Kabupaten Gorontalo. tatap muka langsung merupakan strategi yang efektif dalam membangun komunikasi langsung dengan masyarakat dengan demikian maka akan mudah berkomunikasi langsung dengan pemilih. Komunikasi langsung dengan masyarakat juga dinilai bahwa mampu berpengaruh karena strategi itu merupakan langkah yang dapat meningkatkan perolehan suara partai persatuan pembangunan di Kabupaten Gorontalo. Selain itu strategi PPP juga melalui aktifitas keagamaan didalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan kehidupan masyarakat Gorontalo yang diliputi dengan nilai-nilai keagamaan.

Para caleg akan mendata simpatisan yang ada di desa desa sesuai dapil masing-masing, setelah di data para caleg akan membuat pertemuan dengan simpatisan dan akan membuat relawan muda/tim sukses di desa – desa tersebut dengan minimal tiap desa 5 orang relawan muda/tim sukses. Nantinya 5 orang ini akan mensosialisasikan caleg dan program partai tersebut ditiap dusun yang ada di desa tim sukses. Untuk pemasangan alat peraga kampanye semua calon anggota legislative PPP wajib menampilkan foto Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd tujuannya untuk menarik simpati masyarakat memilih calon-calon dari Partai Persatuan Pembangunan. Di setiap kampanye dialogis PPP di semua kecamatan Se-Kabupaten Gorontalo Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd hadir memberikan orasi politik untuk menyampaikan pesan memilih calon dari partai persatuan pembangunan, tidak bisa dipungkiri beliau sebagai Bupati Gorontalo punya pengaruh menarik simpati dari masyarakat untuk menjatuhkan pilihan terhadap PPP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmat Hasan selaku Anggota DPRD termuda dan pertama kali terjun ke dunia politik melalui wawancara menunjukkan bahwa perilaku pemilih dinilai bahwa pemilih mudah dipengaruhi (Rahmat Hasan, komunikasi pribadi, 2019). Kesempatan itu digunakan oleh PPP untuk digunakan sebagai kesempatan memasuki pemilih mudah dalam menambah kekuatan dan meningkatkan perolehan suara partai. Pemetaan kekuatan juga dilakukan dalam melancarkan serangan terhadap basis pemilih yang dapat membantu PPP meraih suara sebanyak-banyaknya. Namun dalam proses pemilihan legislative terdapat dinamikan dan kenstalisasi politik dalam proses pemilihan umum pada pemilihan legislative di Kabupaten Gorontalo.

Konstelasi pemilihan umum (Pemilu) yang berlangsung pada 17 April 2019 berjalan kompetitif. Perebutan suara bukan hanya terjadi antar partai politik, namun persaingan antar calon anggota legislatif (caleg) di internal partai politikpun sengit, terlebih para petahana kembali bersaing dan mempertahankan kursi wakil rakyatnya. Maka dari itu para penantang yang ingin duduk menjadi anggota dewan harus melakukan kerja-kerja ekstra dan strategi yang mantap untuk mendapatkan suara di masyarakat, kompetisi antar calon anggota legislatif di internal partai

politiknya masing-masing sangat kompetitif. Persaingan tersebut pasti akan terjadi karena setiap individu berlomba-lomba untuk mendulang suara yang banyak. Internal caleg Partai Persatuan Pembangunan sesama dapil di Kabupaten Gorontalo banyak yang mengedepankan persaingan bukan kerjasama sehingga merugikan partai, dimana basis wilayah yang sudah rawat salah satu caleg akan di datangi oleh caleg lain untuk dipengaruhi sehingga perebutan suara hanya terjadi di wilayah yang sudah dikuasai oleh PPP, yang seharusnya sesama caleg PPP bekerja sama untuk mendulang suara di wilayah yang dikuasai oleh partai lain sehingga menambah suara PPP bukan stagnan. Selain hambatan diinternal partai, yang dihadapi dilapangan adalah masyarakat lebih menginginkan adanya pendekatan pragmatis (*money politic*) hal ini banyak ditemui dilapangan saat caleg melakukan blusukan ke desa-desa karena mereka menganggap itu adalah sebuah kelaziman, sebagai upaya partai untuk menghilangkan kebiasaan masyarakat tersebut dengan menjelaskan adanya larangan melakukan politik uang diatur dalam Pasal 523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. "Peserta, tim kampanye, melakukan pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih, baik langsung maupun tidak langsung, itu ketentuan pidananya adalah 4 tahun dan denda Rp 48 juta, baik si pemberi atau penerima akan dikenakan pidana.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait strategi komunikasi politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa strategi pemenangan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gorontalo dalam pemilihan legislatif 2019 menggunakan strategi pemenangan yang memanfaatkan *marketing politic* untuk strategi kampanye baik untuk mendapatkan dukungan politik dalam pemilihan umum maupun untuk memelihara citra sepanjang saat dalam jeda pemilu. Hal tersebut dapat membantu politikus dan partai politik agar lebih efisien dan efektif dalam membangun hubungan dua arah dengan konstituen dan masyarakat. Selain itu, dalam penelitian ini juga berhasil mengungkap tantangan dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh Caleg PPP pada pelaksanaan pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Gorontalo diantaranya adalah *money politic*, *black campaign*, *apatisme politic*, dan tumpang tindih garapan antar sesama caleg di basis pilihan yang sama. Beberapa hal itulah yang dianggap oleh para caleg sebagai tantangan dan hambatan yang paling berat pada pelaksanaan pemilu legislatif 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2015). *Islam & Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ahyani, H., & Nurhasanah, E. (2020). Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 18–43.

- Aji, M. P., & Indrawan, J. (2020). Hambatan dan tantangan partai politik: Persiapan menuju pemilihan umum 2024. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 8(2), 214–229.
- Aji, O. S. L. W. (2016). Optimalisasi Tata Cara Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–13.
- Aneta, A., Podungge, A. W., Hunawa, R., & Nuna, M. (2021). The Difference of Political Participation of Inland Communities and Coastal Communities in Responding to Local Election: Synergy in Combating Covid-19 and Money Politic. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.31314/pjia.10.1.169-180.2021>
- Anggoro, T., Yani, Y. M., Setiabudi, W., & Muradi, M. (2020). Rekrutmen politik calon kepala daerah (Studi tentang seleksi kandidat pada partai amanat nasional pada pemilukada di kota tasikmalaya tahun 2017). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(1), 95–106.
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1). <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi). *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(2), 200–208.
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>
- Giawa, A., & Rini, T. D. (2017). Proses Rekrutmen Sumber Daya Manusia Partai Politik Pada Pileg 2014 (Studi Kasus Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Di Dpw Partai Nasdem Diy). *JBTI: Jurnal Bisnis: Teori dan Implementasi*, 8(2), 161–168.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8 (1), 21–46.
- Hermawan, I. C. (2020). Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(1).
- Imansyah, T. (2012). Regulasi partai politik dalam mewujudkan penguatan peran dan fungsi kelembagaan partai politik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 375–395.
- Jayusdi Rivai. (2019). *Strategi Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Di Kabupaten Gorontalo* [Komunikasi pribadi].
- Juniar, A. (2021). Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki dan Korupsi Partai Politik. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 6(1), 17–39.

- Ketua DPC PPP Kabupaten Gorontalo. (2019). *Perolehan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)* (Nur Istyan Harun, Suaib Napir, Muten Nuna, & Robby Hunawa) [Komunikasi pribadi].
- KPU Kabupaten Gorontalo. (2020). *Jumlah Data Pemilihan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo*. <https://kab-gorontalo.kpu.go.id/>
- Kuswandi, A., Nuraini, S., Alrasyid, M. H., Sadiyyah, Z. N., & Hilman, Y. A. (2023). The Performance of Regency–City DPRD's In The Formulation of Regional Regulations In Indonesia. *Paradigma*, 20(2), 23–42.
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(1), 51–59.
- PERmana, A. S. S., & Adi, A. S. (2015). Pola Kaderisasi Kepemimpinan Partai Politik (Studi Terhadap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten NganjUK). *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2(3), 754–769.
- Putra, P., Kembauw, E., Sebayang, A., & Mukhlis, H. (2020). State owned enterprise for the creation of prosperity for all Indonesian. *Journal of Critical Reviews*, 7(8), 2032–2036.
- Rahmat Hasan. (2019). *Strategi Komunikasi Pemilihan Partai Politik PPP Di Kabupaten Gorontalo* [Komunikasi pribadi].
- Riyadh U.B., A., & Sukmana, H. (2015). Model Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 3(2), 179–198. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v3i2.191>
- Santoso, M. A. (2011). Peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(4), 604–620.
- Searcy, C., & Elkhawas, D. (2012). Corporate sustainability ratings: An investigation into how corporations use the Dow Jones Sustainability Index. *Journal of Cleaner Production*, 35, 79–92.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Suhaimi, E. (2018). Pola Rekrutmen Politik Berdasarkan Ideologi Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 18(1), 105–124.
- Suhaimi, E. (2021). Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam AD/ART Partai Politik Di Indonesia. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(1), 27–51. <https://doi.org/10.51517/jhttp.v7i1.295>

-
- Sukri, M. A. (2020). Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 169–190.
- Syam. (2019). *Strategi Komunikasi Pemilihan Partai Politik PPP Di Kabupaten Gorontalo* [Komunikasi pribadi].
- Tinov, M., & Handoko, T. (2016). Strategi Politik: Preferensi Partai Politik Menghadapi Pemilu di Aras Lokal. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(25), 53–64.
- UB, A. R., & Sukmana, H. (2015). Model Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 3(2), 179–198.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. (t.t.). 21.
- Zaetun, S., & Mar'iyah, C. (2020). Politik Kekerabatan dalam keterwakilan perempuan pada rekrutmen politik partai nasdem pada pemilu 2019. *TheJournalish: Social and Government*, 1(3), 119–129.
- Zuhro, R. S. (2018). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1–41.